

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1 Tinjauan Literatur

Untuk memberikan pedoman dan acuan bagi penelitian yang akan penulis lakukan, penulis mengumpulkan dan menerapkan sejumlah sumber penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik tertentu dalam bab tinjauan pustaka ini.

Kajian berjudul “**Disfungsi *United Nations Fund for Population Activities* (UNFPA) Dalam Mengatasi *Gender Sex Selection* Di Tiongkok**” Menurut laporan ini, sejak tahun 1979 UNFPA sudah hadir di Tiongkok, tahun ketika negara tersebut memperkenalkan kebijakan satu anak, sebuah kebijakan kependudukan yang kontroversial. Hingga tahun 1991, ketika UNFPA menyatakan dirinya menjadi organisasi internasional pertama yang menyuarakan isu ketidaksetaraan gender di Tiongkok, UNFPA terus memberikan bantuan ke Tiongkok. Kebijakan satu anak, yang memperburuk fenomena pemilihan jenis kelamin yang sudah berlangsung lama di negara ini, adalah sumber penyakit ini (Aksani, 2018a).

Fenomena pemilihan jenis kelamin ini dapat dilihat dari ketidakseimbangan statistik *Sex Ratio at Birth* (SRB) yang dari kondisi normal lebih melambung tinggi. mengingat semua upaya yang telah dilakukan UNFPA, untuk menyeimbangkan kembali BPRS dan memberantas fenomena pemilihan jenis kelamin berdasarkan gender. Namun demikian, tampaknya UNFPA tidak mampu mencapai tujuannya. Kegagalan ini merupakan tanda disfungsi UNFPA. Gagasan mengenai disfungsi organisasi internasional yang memiliki dua dimensi—budaya dan material—digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis disfungsi yang dialami UNFPA. Baik elemen internal maupun eksternal,

seperti birokrasi politik, konversi kekuasaan, budaya birokrasi, dan keadaan lingkungan kerja, berdampak pada efektivitas organisasi di setiap dimensi (Aksani, 2018b).

Kajian berjudul **“Disfungsi Peran UNFPA Atas Kebijakan Kependudukan di Tiongkok Pada Tahun 1979-1994”**. Didirikan pada tahun 1969, Dana dan Kependudukan PBB adalah badan PBB yang bertugas membantu negara-negara miskin dalam menyelesaikan masalah terkait kependudukan. Tiongkok merupakan salah satu penerima bantuan tersebut. Pemerintahan Deng Xiaoping memperkirakan bahwa jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, Tiongkok akan menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan pembangunannya. Untuk menghentikan pertumbuhan penduduk, Deng Xiaoping menerapkan Kebijakan Satu Anak yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (Syafitri et al., 2020a).

Dukungan yang diberikan UNFPA kepada pemerintah Tiongkok disalahgunakan untuk memungkinkan penerapan kebijakan satu anak yang opresif dari pemerintah. Zhang Yishan, utusan Tiongkok untuk PBB, menyatakan bahwa pemerintah Tiongkok harus menerapkan program keluarga berencana yang ketat mengingat pertumbuhan populasi yang pesat di negara tersebut sebagai tanggapan terhadap banyak keluhan asing mengenai sifat pemaksaan dari pemerintah Tiongkok. Lebih lanjut Zhang Yishan menyatakan bahwa populasi Tiongkok akan meroket dan membahayakan stabilitas negara Tiongkok sendiri jika bukan karena Kebijakan Satu Anak yang telah diterapkan selama tiga puluh tahun. Ia mengklarifikasi bahwa pejabat keluarga berencana dilarang secara hukum menggunakan taktik pemaksaan dalam setiap bagian pekerjaannya ketika berbicara tentang pendekatan pemaksaan yang digunakan untuk menegakkan program (Syafitri et al., 2020b).

UNFPA telah membantu Tiongkok dalam menerapkan Kebijakan Satu Anak sejak awal. Tindakan koersif yang harus dijalani oleh masyarakat Tiongkok menunjukkan peran UNFPA yang tidak berfungsi. Ada dua faktor yang berperan dalam disfungsi UNFPA: dimensi material dan budaya. Secara umum, anggapan motivasi yang mengarahkan UNFPA untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berada di luar misinya adalah akar

penyebab disfungsi yang dihadapi organisasi ini. Tiongkok, dengan kuantitas jiwa terbanyak di dunia, sangat membutuhkan bantuan dalam memperlambat peningkatan total penduduk di negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok harus mengambil tindakan tegas untuk mengendalikan peningkatan jumlah penduduk di negara tersebut. Tanggung jawab UNFPA satu-satunya adalah membantu Tiongkok dalam menegakkan kebijakan satu anak. Tanpa adanya pendekatan yang tegas, pertumbuhan penduduk yang cepat di Tiongkok akan menghasilkan keseimbangan alami (Syafitri et al., 2020b).

Kajian berjudul **“Peran Unicef Dalam Menangani Kasus Aborsi Dan Perdagangan Anak Di Tiongkok Tahun 2008-2014”** Kebijakan satu anak yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok menimbulkan berbagai dampak buruk, termasuk peningkatan aborsi dan kasus perdagangan anak di negara tersebut. UNICEF, sebuah badan internasional yang bekerja sebagai tameng bagi anak-anak seperti, melindungi anak-anak dari jual-beli manusia dan aborsi, telah memperhatikan kasus-kasus kejahatan tersebut di Tiongkok. Selain menyoroti fakta bahwa keberlangsungan hidup, penjagaan, dan tumbuh kembang anak adalah fundamental utama pembangunan global—yang bermanfaat dalam memperpanjang umur manusia—UNICEF berupaya membela hak-hak anak untuk mencapai kesejahteraan mereka (Maharani, 2020a).

Tiongkok telah mengubah kebijakan satu anak sebagai konsekuensi dari kerja sama dan keterlibatan UNICEF dengan pemerintah Tiongkok dengan mempertimbangkan dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Peraturan tersebut, yang kemudian diubah untuk mengizinkan kelahiran dua anak, menunjukkan kontribusi UNICEF dalam memerangi perdagangan anak dan aborsi di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok telah memutuskan untuk mengizinkan setiap pasangan untuk memiliki dua anak mulai tanggal 1 Januari 2016. Ada pendapat bahwa kebijakan satu anak memiliki tujuan utama untuk menurunkan kepadatan penduduk namun justru mempunyai konsekuensi merugikan lainnya, yaitu tingginya angka aborsi. kasus. Pemerintah menyadari adanya blunder tersebut dan banyaknya manfaat dan negatif masyarakat terhadap kebijakan ini. Hal ini

disebabkan oleh peraturan pemerintah yang ketat, yang hanya memperbolehkan orang tua untuk memiliki satu anak dan mengenakan denda yang besar jika diketahui bahwa mereka adalah orang tua dari dua anak (Maharani, 2020b).

Penelitian berjudul **“Populasi *Two child Policy* dan Reformasi Tiongkok”** Kebijakan Satu Anak telah memberikan dampak baik dan buruk terhadap perempuan sejak diberlakukan pada tahun 1979. Salah satu komponen langsung dari strategi pertumbuhan ekonomi besar Tiongkok adalah *One Child Policy*, yang bermaksud “mengganggu” pertumbuhan penduduk dan mengurangi beban pada masyarakat. sumber daya, pekerjaan, dan infrastruktur. Hampir semua keluarga dapat membatasi jumlah anak mereka menjadi satu berkat strategi ini. Permasalahannya adalah kebijakan ini tidak boleh dilihat sebagai respons jangka panjang terhadap kendala ekonomi; sebaliknya, hal ini harus dilihat sebagai tindakan sementara yang dirancang untuk memungkinkan negara mencapai tujuan ekonominya dan mendukung gagasan keluarga sederhana. Ada kritik terhadap kebijakan ini. Hal ini berarti pelanggaran hak asasi manusia dan menempatkan perempuan dalam bahaya (Nizmi, 2019a).

Peraturan sosial dan ekonomi yang membatasi kemampuan pasangan untuk memiliki lebih dari satu anak sudah ketinggalan zaman pada periode sekarang. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memperlambat pertumbuhan penduduk, sehingga Tiongkok dapat melaksanakan reformasi ekonomi dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sebagai akibat dari pengembangan kebijakan ini, sejumlah dampak yang sebelumnya tidak terpikirkan telah muncul, termasuk peningkatan nilai sumber daya manusia bagi perempuan dan peningkatan pentingnya melahirkan anak perempuan (Nizmi, 2019b).

Penyesuaian ini tidak terjadi secara tiba-tiba; selama lebih dari 28 tahun, negara bagian ini secara berkala telah mengubah undang-undangnya agar dapat lebih memenuhi tuntutan masyarakat. Melihat pergeseran perspektif gender dan jumlah anggota keluarga, terdapat optimisme bahwa reformasi sosial masih berlangsung di beberapa wilayah di

Tiongkok. Banyaknya kesenjangan dalam kebijakan ini memungkinkan kita untuk mempertimbangkan apakah kebijakan ini hanya sekedar seruan dan bukan implementasi nyata yang dikemas dengan hukuman. Nyatanya, revisi kebijakan satu anak ini perlu dilakukan (Nizmi, 2019b).

Penelitian berjudul “*The Two child Policy And It’s Impact on Chinese Families*” Kebijakan ini mendapat kritik keras dari dunia internasional karena menyalahi hak asasi manusia yang dibuktikan dengan sterilisasi dan aborsi paksa, serta meluasnya penelantaran dan/atau penelantaran bayi perempuan. Pasalnya, kebijakan ini belakangan diperluas melalui undang-undang baru sebagai strategi demografi bangsa di masa depan. Dunia internasional mengecam keras program ini karena dianggap melanggar hak asasi manusia, termasuk meluasnya penelantaran perempuan hamil dan/atau anak perempuan. serta sterilisasi paksa dan aborsi. Alasannya adalah bahwa program ini baru saja diperluas melalui undang-undang baru yang dimaksudkan sebagai rencana demografi jangka panjang negara tersebut (Settles, 2019a).

Sebagai reaksi terhadap keadaan ini, beberapa organisasi asing bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok untuk mengembangkan proyek atau rencana masa depan sekaligus menangani pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok. Dengan dicabutnya kebijakan satu anak, era baru dalam perencanaan kependudukan telah dimulai di Tiongkok. Bukan berarti hal ini kurang signifikan saat ini, namun hal ini menjadi lebih menonjol mengingat fokus saat ini pada “desain tingkat atas,” yang mengatur pertumbuhan penduduk secara lebih menyeluruh dan politis. Hal ini berarti menghilangkan hambatan administratif yang pernah memisahkan birokrasi yang terorganisir secara vertikal dan memberikan “kesehatan” penduduk sebagai prioritas yang lebih tinggi daripada “perencanaan kelahiran”(Settles, 2019b).

Kelima tinjauan literatur yang dibahas di atas semuanya sampai pada kesimpulan yang sama tentang penelitian yang diperlukan. Kesesuaian berfokus pada pengujian

langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Tiongkok untuk memperlambat peningkatan populasi guna menarik perhatian lembaga internasional seperti UNICEF dan UNFPA. Namun dalam studi ini, kontribusi UNFPA terhadap upaya pemerintah Tiongkok untuk memperlambat peningkatan populasi tanpa mengorbankan hak asasi manusia mendapat perhatian yang lebih besar. Penekanan diskusi studi tersebut, yang menyoroti inisiatif yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok bekerja sama dengan UNFPA dan dievaluasi antara tahun 2018 dan 2022, merupakan titik awal ditemukannya perbedaan di antara keduanya. Terdapat perbedaan di antara penelitian-penelitian tersebut dalam hal fokusnya, karena tidak ada kesamaan yang ditemukan.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Teori Populasi

Thomas R. Malthus (1789) memperkenalkan teori kependudukan untuk pertama kalinya. Malthus, seorang ekonom politik dan ahli demografi dari Inggris, memberikan kontribusi pada teori kependudukan dalam pembangunan global. Makalahnya, *The Principle of Population*, begitu populer sampai seluruh gerakan teori kependudukan dijuluki Malthusian, atau neo-Malthusian dalam bentuknya yang lebih kontemporer. Malthus memberikan dua pernyataan dalam artikel ini untuk mengungkapkan sudut pandang tertentu terhadap populasi manusia: Manusia akan selalu membutuhkan makanan, dan mereka juga akan selalu membutuhkan gairah antar jenis kelamin (Naibaho et al., 2023).

Malthus dalam (Manora et al., 2022) menawarkan sudut pandang tentang populasi yang coba dijelaskan oleh teorinya. Menurut Malthus, kemampuan pertumbuhan penduduk untuk menghasilkan kebutuhan dasar hidup manusia tidak terbatas dan lebih kuat dibandingkan dengan kapasitas yang melekat pada bumi. Hal ini menunjukkan bahwa laju peningkatan populasi manusia secara global melebihi kemampuan bumi dalam memenuhi kebutuhan penduduknya. Akibatnya,

pada akhirnya akan terjadi kesenjangan yang signifikan antara jumlah penduduk di bumi dan ketersediaan sumber daya alam. Teori Malthus kemudian menunjukkan bahwa jika kondisi ini tidak diatasi, masyarakat pada akhirnya akan menghadapi kelaparan dan kemiskinan. Inilah alasan perlunya membatasi ekspansi populasi. Mengingat hal ini, Malthus mengajukan dua gagasan penting untuk memperlambat pertumbuhan penduduk: adanya pemeriksaan positif dan preventif (Junior, 2020a).

Pertama, *Positive Check* merupakan metode pengurangan jumlah penduduk dengan kematian, sesuai dengan Malthus. Ia percaya bahwa jika jumlah penduduk di bumi lebih banyak daripada jumlah makanan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, maka pasti akan timbul banyak masalah, termasuk kelaparan, epidemi penyakit, kriminalitas, dan bahkan konflik. Kedua, penekanan kelahiran adalah metode pengurangan populasi yang dikenal sebagai “Pemeriksaan Pencegahan”. Malthus berpendapat bahwa pengendalian moral, pengendalian sifat buruk manusia dan hasrat seksual, atau menurunkan jumlah kelahiran melalui sistem aborsi dan penggunaan kontrasepsi adalah cara terbaik untuk mengendalikan populasi (Junior, 2020b).

Perspektif Malthus kemudian diperluas sekali lagi agar lebih dapat diterapkan pada keadaan dunia saat ini. Tanpa menghilangkan anggapan bahwa populasi manusia akan bertambah cepat, guna teknologi yang terus terbarukan dan pembangunan ekonomi dapat menghasilkan penunjang kependudukan dan pergerakan besar menuju subsistem kebutuhan hidup manusia. Belakangan, perspektif Neo-Malthus mengembangkan anggapan ini (Brown, 2021a).

Paul Ehrlich dan Garreth Hardin termasuk di antara mereka yang memiliki pendapat serupa, percaya bahwa diperlukan lebih banyak upaya pencegahan untuk mengurangi populasi manusia. Dari sudut pandang ini, sangat disarankan bagi pasangan suami istri untuk menggunakan kontrasepsi selain pengendalian sederhana untuk mengurangi peningkatan populasi dan hasrat seksual. Dalam

mempertimbangkan strategi untuk memperlambat laju pertumbuhan, sudut pandang ini sangatlah ekstrim. Memang benar, mereka mempertimbangkan perlunya organisasi internasional dan negara-negara untuk melakukan intervensi guna memaksimalkan upaya-upaya ini (Brown, 2021b). Perspektif Neo-Malthus Paul Ehrlich tidak membantah anggapan bahwa kerawanan pangan pada negara—khususnya negara berkembang—nantinya menyulut serangkaian krisis geopolitik yang pada akhirnya berujung pada perang.

Sejarah strategi pengendalian populasi Tiongkok dikaji dengan menggunakan teori populasi ini sebagai landasan. Hipotesis ini berpotensi menjadi sudut pandang mendasar ketika mengkaji tren demografi, khususnya di negara-negara berpenduduk padat seperti Tiongkok. Penulis menggunakan hipotesis ini untuk menjelaskan mengapa pemerintah Tiongkok melakukan tindakan pengendalian populasi.

2.2.2 Teori Organisasi Internasional

Gagasan tentang organisasi internasional berawal dari liberalisme. Menurut sudut pandang ini, ada perdamaian abadi yang dapat dicapai melalui kolaborasi. Sudut pandang ini juga berpendapat bahwa kolaborasi internasional dan pembentukan organisasi internasional merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan dalam komunitas global (Norouzi, 2023). Menurut Clive Archer (2001) dalam (Hartana, 2022a), organisasi internasional adalah suatu lembaga yang diakui secara hukum dan timbul dari kesepakatan bersama antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dengan tujuan mewujudkan tujuan bersama. Duverger dalam (Golia, 2020), sebaliknya, menggambarkan organisasi internasional sebagai jenis organisasi hubungan internasional bisa diperhatikan dari institusi dalam bentuk struktur kolektif atau sosial mendasar yang diatur oleh

adat istiadat manusia atau hukum manusia, seperti perdagangan dan diplomasi. Organisasi internasional terbagi dalam tiga kelompok menurut Cliver Archer dalam (Hartana, 2022b):

1. Negara-negara menggunakan organisasi internasional sebagai alat untuk merancang kebijakan nasional untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, organisasi internasional juga berfungsi sebagai pendukung tambahan dalam implementasi kebijakan negara;
2. Organisasi internasional berfungsi sebagai tempat pertemuan dan forum di mana negara-negara anggota dapat berinteraksi dan berkolaborasi untuk mengatasi tantangan global, dengan tujuan membangun dukungan internasional;
3. Organisasi internasional mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak lain, hal ini menunjukkan perannya sebagai aktor independen dalam urusan internasional.

Dari ketiga peran tersebut terlihat bahwa organisasi internasional dapat berfungsi sebagai fasilitator, inisiator, rekonsiliasi, dan mediator. Namun Cliver Archer juga menyampaikan bahwa terdapat sembilan fungsi organisasi internasional yang berpotensi mempengaruhi sistem internasional (Hartana, 2022b):

1. Artikulasi dan Agresi: Organisasi internasional bertindak sebagai alat bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagresi kepentingan nasionalnya;

2. Norma: Organisasi internasional aktif dalam berbagi dan menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip non-diskriminatif dalam sistem internasional;
3. Perekrutan: Organisasi internasional bertanggung jawab untuk merekrut peserta atau anggota yang terlibat dalam sistem politik internasional;
4. Sosialisasi: Proses sosialisasi di tingkat internasional dilakukan oleh negara-negara melalui berbagai lembaga, dengan tujuan untuk memperkenalkan dan menerapkan nilai-nilai yang berlaku dalam sistem internasional untuk meningkatkan kerja sama antar negara anggota;
5. Pembentukan Peraturan: Dalam sistem internasional yang tidak memiliki lembaga resmi untuk membuat peraturan seperti pemerintah atau parlemen, organisasi internasional mempunyai peran penting dalam membentuk peraturan berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota;
6. Implementasi Peraturan: Organisasi internasional bertugas untuk menerapkan aturan yang telah mereka buat, meskipun penerapannya terbatas pada negara anggota;
7. Persetujuan Peraturan: Organisasi internasional mempunyai tanggung jawab untuk meratifikasi peraturan yang ada dalam sistem internasional;

8. Operasional: Organisasi internasional menjalankan berbagai fungsi operasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat global, seringkali berkoordinasi dengan pemerintah;
9. Data atau Informasi: Organisasi internasional mempunyai peran penting dalam mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan data atau informasi yang diperlukan untuk menangani masalah atau konflik global, dengan menggunakan sumber informasi yang memadai dan mendapatkan legitimasi dari anggotanya.

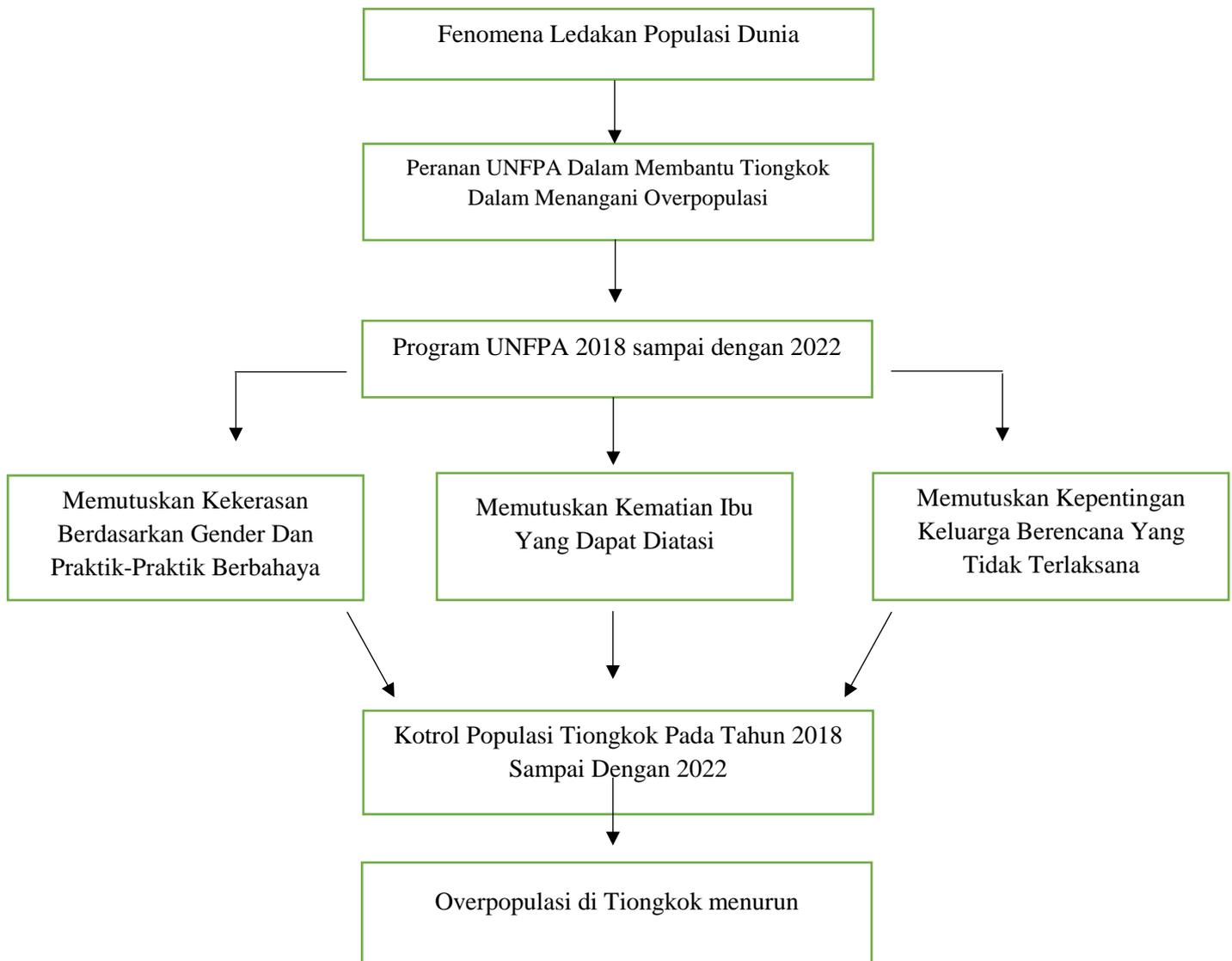
Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa organisasi internasional mempunyai peran penting dalam membentuk dan mengelola tatanan global, dengan fokus pada penegakan aturan, penetapan norma, dan pengelolaan informasi untuk kepentingan bersama negara-negara anggota.

2.3 Asumsi

Dengan ini peneliti memberi asumsi bahwa adanya kontribusi *United Nation Fund For Population Activities* (UNFPA) melalui *two child policy* dalam meminimalisir overpopulasi di Tiongkok. Dalam kolaborasi yang dibangun antara Pemerintah Tiongkok dengan UNFPA dengan jenjang waktu 2018 sampai dengan 2022, telah dilalui sejumlah program seperti mengakhiri kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya, memutuskan kematian ibu yang bisa diatasi, memutuskan kepentingan keluarga berencana yang tidak terlaksana. Untuk menunjang keberhasilan dari program kolaborasi antara kedua belah pihak dengan menghabiskan banyak biaya. Sehingga program-

program yang telah direalisasikan oleh UNFPA dapat mensukseskan upaya peredaman overpopulasi di Tiongkok.

2.4 Kerangka Analisis



Gambar 2.1 Kerangka Analisis

Sumber: Diolah Oleh Penulis